

**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DI KANTOR DESA MADDANRENG PULU KEC. PATIMPENG KAB.
BONE**

Nunu Apriani¹, Andi Patimbangi², Ida Farida³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : nunuapriani2606@gmail.com¹, andipatimbangi@yahoo.com², ida.farida@iain-bone.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the application and impact of accrual-based accounting on financial performance at Maddanreng Pulu Village Office, Patimpeng Subdistrict, Bone Regency. The results showed that Maddanreng Pulu Village Office has implemented accrual-based accounting in its financial management, which is implemented through the use of the Village Financial System (SISKUDES) since 2018. This system is proven to help optimize the management of financial reports in the planning, reporting, and accountability stages. The implementation of an accrual-based accounting system has a positive impact on the village's financial performance because it is able to record transactions not only when cash comes in and out, but also when transactions occur, including unearned income and unpaid expenses. The use of SISKUDES also contributes significantly to improving the transparency and accountability of village financial management. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

Keywords: *Accrual-Based Accounting, Financial Performance, SISKUDES, Transparency, Accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan dampak akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Desa Maddanreng Pulu telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangannya, yang diimplementasikan melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sejak tahun 2018. Sistem ini terbukti membantu optimalisasi pengelolaan laporan keuangan dalam tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan desa karena mampu mencatat transaksi tidak hanya pada saat kas masuk dan keluar, tetapi juga pada saat transaksi terjadi, termasuk pendapatan

yang belum diterima dan beban yang belum dibayar. Penggunaan SISKUDES juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrua, Kinerja Keuangan, SISKUDES, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Akuntansi publik adalah kegiatan jasa yang menyajikan informasi keuangan negara dari metode pencatatan, penggolongan, dan sintesis, transaksi keuangan negara dan interpretasinya. Akuntansi publik memiliki kedudukan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai administrasi pemerintahan yang baik, dimulai dari administrasi keuangan di tingkat sentral, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi publik tentang akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola keuangan umum tidak hanya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah sentral, tetapi hingga ke desa (Az-Zahra et al., 2023).

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik untuk

memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Abdulkarim, 2020).

Peranan pemerintah dalam menaikkan informasi keuangan terhadap laporan keuangan harus dilakukan pembaruan dalam penyajian laporan keuangan sebagai dasar acuannya. Penyajian laporan keuangan yang andal sangat diperlukan agar penulisan laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. Aset tetap adalah salah satu

komponen operasi terpenting dalam mendukung operasi perusahaan.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Kawedar et al., 2008). Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan *good governance* (Manalu et al., 2024).

Laporan Keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban

keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan. Laporan keuangan pada dasarnya disusun guna memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan daerah yang dilakukan serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional pada pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Menurut Harmawanto, et al. (2019) Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya

adalah satuan tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Adalah Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bangsa Indonesia Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan adalah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Adapun pengertian dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar dan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (Rahmawati et al., 2023).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa juga dapat dikategorikan sebagai daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian menurut dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tadi sinkron menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 72 ayat (1), desa mempunyai pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian menurut hasil pajak dan netribusi kabupaten/kota (paling sedikit 10%) dana desa menurut APBN dan donasi keuangan dari APBD provinsi/kabupaten, dan bantuan gratis dan

sumbangan dari pihak ketiga (Maharani & Akbar, 2020).

Dari Hasil Observasi Awal yang telah dilakukan oleh peneliti, Kantor Desa Maddanreng Pulu sudah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual dan memiliki laporan keuangan dalam bentuk Manual dan Aplikasi, dimana Aplikasi yang digunakan di Kantor Desa tersebut yaitu Aplikasi SISKUDES yang langsung dari kementerian. Aplikasi SISKUDES itu sendiri merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerasi serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien (Asih & Adiputra, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual

terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dengan lima orang aparat desa, dan dokumentasi, dimana data primer diperoleh langsung dari bendahara desa sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan, dengan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada efisiensi objek penelitian serta hasil observasi awal yang menunjukkan kesesuaian dengan permasalahan yang belum pernah diteliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Kota Tanjungpinang sendiri sudah diterapkan sejak tahun 2010 dan telah mendapatkan capaian opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali sejak tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah baik dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang

diterapkan. Akuntansi sektor publik mempunyai peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas tersebut maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dengan diperolehnya opini WTP oleh Kota Tanjungpinang selama 8 tahun berturut menandakan bahwa kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah baik dan dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangannya. Selain itu terdapat beberapa faktor lain juga yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Keuangan seperti, Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah

menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Kualitas dari pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan, atau laporan keuangan itu memenuhi kebutuhan pengguna. Kualitas pelaporan keuangan juga dapat didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang disampaikan oleh proses pelaporan keuangan (Martínez-Ferrero, 2014). Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan. Laporan keuangan pada dasarnya disusun guna memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan daerah yang dilakukan serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional pada pemerintah daerah (Anggraini, 2020).

Kantor Desa Maddanreng Pulu melakukan pengelolaan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Aplikasi SISKUDES dan Laporan Manual, dimana Aplikasi SISKUDES langsung dari Kabupaten yang secara langsung bisa dikontrol melalui Aplikasi tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dimana Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kinerja Keuangan Di Kantor Desa Maddanreng Pulu, sudah menerapkan Akuntansi Berbasis AkruaI untuk pelaporan keuangan kas masuk maupun kas keluar selama setahun untuk mencapai laporan keuangan yang lebih optimal.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas, dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode

terdahulu atau sebelumnya (Harini et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone meningkatkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang dimana pencatatan kas masuk dan kas keluar dicatat pada saat terjadinya transaksi, dengan berjalannya waktu kewaktu terdapat peningkatan kerja dengan menggunakan sistem Aplikasi SISKUDES yang lebih muda untuk melakukan perencanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan hasil yang lebih optimal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah

memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Abdulkarim, 2020).

Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan pemerintah negara-negara maju untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan *good governance* (Manalu et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus, S.E., Dengan adanya akuntansi berbasis akrual, lebih memudahkan Bendahara Desa dalam pengelolaan laporan keuangan agar lebih optimal dan meningkatkan kualitas pekerjaan dari waktu ke waktu, karena akuntansi berbasis akrual salah satu langkah yang progresif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain dari akuntansi berbasis akrual Kantor Desa Maddanreng Pulu sudah menggunakan sistem yang lebih canggih

yang dimana sistem tersebut adalah Aplikasi SISKUDES, yang memudahkan Bendahara Desa untuk melakukan perencanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang datanya langsung terpantau dari Kabupaten. Selain memudahkan untuk digunakan, sistem Aplikasi SISKUDES tersebut terdapat keterbatasan penggunaan seperti terkendala dengan jaringan yang kurang maksimal di Desa Maddanreng Pulu, dan mengalami Error pada Aplikasi. Ketika terjadi masalah maupun kendala pada saat penggunaan maka disitulah terjadinya Asistensi ke Admin kabupaten untuk melakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, Kantor Desa tersebut sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan. Selaian menggunakan pencatatan yang manual Kantor Desa Maddanreng Pulu juga menggunakan sistem Aplikasi SISKUDES dalam pengelolaan laporan keuangan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Di

**Kantor Desa Maddanreng Pulu
Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone**

Di Indonesia, gerakan akuntansi menuju berbasis akrual dimulai sejak gerakan reformasi tahun 1998 dan ditetapkannya (Undang-undang nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara. Proses implementasi tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala, terutama berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia akuntansi yang terampil dan peraturan tingkat pusat yang tidak selaras dengan peraturan di daerah. Oleh karena itu, langkah awal untuk mengantisipasi munculnya masalah tersebut adalah dengan menyiapkan strategi implementasi yang komprehensif dan perlu mencermati dari aspek perilaku berbagai pihak yang berkaitan dengan sistem akuntansi akrual di daerah. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah (Erawati & Kurniawan, 2018).

Peranan pemerintah dalam menaikkan informasi keuangan terhadap

laporan keuangan harus dilakukan pembaruan dalam penyajian laporan keuangan sebagai dasar acuannya. Penyajian laporan keuangan yang andal sangat diperlukan agar penulisan laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. Aset tetap adalah salah satu komponen operasi terpenting dalam mendukung operasi perusahaan.

Reformasi akuntansi di Indonesia dimulai secara bertahap untuk menuju akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Indonesia pertama kali melakukan perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas (cash basis) menjadi sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual). Hal ini diperkuat dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dengan basis cash towards accrual (CTA) (Harahap, n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu menyangkut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan SAP yang sebelumnya tentang kebijakan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP telah membawa perubahan besar dalam sistem informasi keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari akuntansi kas menjadi akuntansi akrual dalam akuntansi keuangan pemerintah (Wahyudi et al., 2022).

Penggunaan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan memudahkan bendahara Desa Maddanreng Pulu untuk pengelolaan laporan keuangan karena tercatatnya secara langsung kas masuk dan kas keluar, dan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) mulai diterapkan di desa pada tahun 2016, dimana dirancang untuk membantu Pemerintah Desa Mengelola Keuangan efektif dan efisien. Aplikasi SISKUDES tersebut digunakan untuk berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Desa Maddanreng Pulu, sudah menggunakan Aplikasi SISKUDES dan akuntansi berbasis Akrual untuk tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban diterapkan di tahun 2018, yang awal penggunaannya mengalami kesulitan dan membutuhkan jaringan cukup optimal untuk menggunakan Aplikasi SISKUDES, ketika terjadi masalah pada

aplikasi tersebut langsung melakukan asistensi di kabupaten untuk perbaikan. Dengan adanya Sistem Aplikasi tersebut dapat memudahkan Bendahara Desa untuk menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor desa maddanreng pulu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan, namun untuk meningkatkan efektivitas lebih layak perlu dilakukan pelatihan staf akuntansi dan penguatan sistem pengendalian internal.

Peranan pemerintah dalam menaikkan informasi keuangan terhadap laporan keuangan harus dilakukan pembaruan dalam penyajian laporan keuangan sebagai dasar acuannya. Penyajian laporan keuangan yang andal sangat diperlukan agar penulisan laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. Aset tetap adalah salah satu komponen operasi terpenting dalam mendukung operasi perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membiayai kegiatan dan juga pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah

Kabupaten Pamekasan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah menjadi dasar pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan. SAP adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Wahyudi et al., 2022).

Dalam ruang lingkup pemerintah pusat, pelaporan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menteri Keuangan menerima Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan layanan umum pada kementerian/lembaga negara, yang kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Menteri Keuangan yang memiliki wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara bertanggungjawab penuh menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan

negara dan badan lainnya. Khusus untuk pemerintah daerah, (undang - undang nomor 17 Tahun 2003) tentang keuangan negara, (undang - undang nomor 1 Tahun 2004) tentang perbendaharaan negara, (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan (peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Erawati & Kurniawan, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus, S.E. selaku Bendahara Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, menunjukkan bahwa menggunakan akuntansi berbasis akrual dan sistem Aplikasi SISKUDES, sangat berdampak terhadap pengerjaan laporan keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu meski pada saat menggunakan aplikasi sering terjadi keterbatasan jaringan dan eror tapi tetap memberikan dampak terhadap pengelolaan kinerja keuangan karena memberikan langkah yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dimana sistem tersebut mencatat transaksi

tidak hanya saat kas keluar dan masuk, tetapi juga pada saat transaksi terjadi, baik pendapatan belum diterima maupun beban yang belum dibayar. Sehingga informasi keuangan terjadi lebih akurat dan relevan dengan mencerminkan kondisi keuangan desa secara real-time, lebih mudah memahami penggunaan anggaran desa dan mengawasi kinerja pemerintah desa, pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan sistematis, dan pemerintah desa dapat lebih bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan memberikan laporan yang lebih terperinci kepada masyarakat. Meski pada saat menggunakan aplikasi sering terjadi keterbatasan jaringan dan eror pada aplikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan penggunaan sistem Aplikasi SISKUDES sangat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, karena memberikan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa. Dengan mencatat transaksi pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar, dan sistem ini juga memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang kondisi keuangan desa. Dan pada saat penggunaan sistem Aplikasi

SISKUDES sering terkendala dengan jaringan dan eror pada aplikasi, tapi tidak terjadi masalah besar karena dapat dilakukan yang dinamakan asistensi ke admin Kabupaten untuk melakukan perbaikan.

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, telah terbukti sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu, dan terbukti juga sudah menggunakan sistem Aplikasi SISKUDES pada tahun 2018 sehingga dapat membantu Pemerintah Desa terhadap pengelolaan laporan keuangan agar lebih optimal dalam tahap perencanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, terbukti telah memberikan dampak bagi kinerja keuangan di Kantor Desa Maddanreng Pulu karena sistem tersebut mencatat transaksi tidak hanya saat kas keluar dan masuk, tetapi juga pada saat transaksi terjadi, baik pendapatan belum diterima maupun beban yang belum dibayar, dan terbukti juga dengan menggunakan sistem Aplikasi

SISKEUDES memberikan dampak terhadap pengelolaan kinerja keuangan karena memberikan langkah yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, R. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(3), 381–392.
- Anggraini, L. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Opd Kota Sungai Penuh: Luky Primadita Anggraini, S. Ap. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 2(6), 113–124.
- Asih, G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0. 3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 12–23.
- Az-Zahra, S. F., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1).
- Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 313–332.
- Harahap, S. H. (n.d.). Implementasi Prosedur Akuntansi Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).
- Harini, D., Riono, S. B., & Syaifulloh, M. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes. *Syntax*, 2(3), 18–25.
- Harmawanto, J., Poernomo, Y. C. S., & Winarto, S. (2019). Analisa Anggaran Biaya Dan penjadwalan proyek Perbaikan Tanggul Kali Bakungdesa Cengkong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(2), 224–234.
- Kawedar, W., Rohman, A., & Handayani, S. (2008). Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah.

- Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20.
- Manalu, M. E., Handani, T., Lubis, P. K. D., & Irfansyah, F. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Kantor Desa Kolam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 673–680.
- Martínez-Ferrero, J. (2014). Consequences of financial reporting quality on corporate performance: Evidence at the international level. *Estudios de Economía*, 41(1), 49–88.
- Rahmawati, S., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Analisa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3129–3137.
- Wahyudi, F. A., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Timur Kabupaten Pamekasan (Studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(06).